



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 23 Juni 2021

Halaman: 4

Pemangku Kepentingan Harus Tegas agar Covid-19 Terkendali

TAJUK

Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia akhir-akhir ini membuat 87 daerah memiliki keterisian rumah sakit atau *bed occupancy rate* (BOR) RS khusus pasien virus Corona (Covid-19) di atas 70%. Dengan kondisi tersebut pemerintah akhirnya memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro diperkuat. Penguatan itu akan dilakukan mulai Selasa (22/6), hingga 5 Juli mendatang.

Penguatan PPKM Mikro itu nantinya dituangkan dalam Instruksi Mendagri. Salah satu yang diatur adalah soal operasional tempat usaha, khususnya restoran maupun warung makan. *Dine in* atau makan di tempat hanya diperbolehkan maksimal 25%.

Kemudian kegiatan restoran, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mal ini untuk kegiatan *dine in* atau makan minum paling banyak 25% dari kapasitas dan sisanya di-*take away* ataupun dibawa pulang. Dan masih banyak lagi.

PPKM mikro yang diperketat itu pula yang akan diberlakukan di DIY. Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan DIY tidak memungkinkan melakukan *lockdown* secara total. Karena pemerintah tidak kuat menanggung untuk menutup aktivitas masyarakat secara total. Oleh karena itu keputusan terakhir untuk mengurangi penyebaran Covid-19 hanya tetap dengan PPKM Mikro lebih diperketat. DIY termasuk dalam daerah dengan peningkatan kasus Covid-19 tinggi. Rata-rata dalam satu hari terdapat 600 warga Bumi Mataram yang positif Covid-19. Selama ini PPKM Mikro cenderung loyo dan tak bertaji. Terbukti banyak kegiatan di level mikro banyak yang tak memenuhi aturan main. Satgas level mikro juga tidak tegas. Hal ini diperparah dengan masih banyaknya warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Dua hal ini yang membuat kasus Covid-19 meledak tak terkendali.

PPKM mikro yang berjilid-jilid ini terbukti tak ampuh membendung kasus Covid-19. Butuh strategi baru yang lebih tegas lagi atas pelanggaran protokol kesehatan. Tanpa ada tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran prokes, upaya melawan pandemi hanya akan sia-sia.

Apalagi saat ini varian baru sudah banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Varian baru tersebut penularannya sangat cepat dan risikonya juga lebih tinggi. Jika strategi penanganan Covid-19 masih mengandalkan pola yang sama tidak membuat terobosan baru, kasus penambahan Covid-19 akan terus terjadi.

Selain itu, kebijakan yang diambil harus didukung semua pihak. Warga juga harus disiplin dalam penerapan protokol kesehatan yang merupakan kunci utama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers
4.			
5.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005